

## DAFTAR PUSTAKA

### 1) Buku

- Abror, H. Khoirul, *Hukum perkawinan dan Perceraian*, Bening Pustaka, 2020.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2021.
- Hickey, Jennifer, *The Foundations of Vulnerability Theory: Feminism, Family, and Fineman*, Taylor & Francis, 2023.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Analisa Yahanan, *Hukum perceraian*, Sinar Grafika, 2022.
- Nandang Sunandar, *Eksekusi Putusan Perdata: Proses Eksekusi dalam Tataran Teori dan Praktik*, Nuansa Cendekia, 2021.
- Royani, Esti, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila*, Zahir Publishing, 2021.
- Saleh, Indah Nur Shanty, Loso Judijanto, Nurul Widhanita Y. Badilla, Novea Elysa Wardhani, H. Hartawan, dan Isnayani Isnayani, *Hukum dan Peradilan di Indonesia: Kajian Teori dan Praktik Hukum di Indonesia*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Töns, John, *John Rawls and environmental justice: implementing a sustainable and socially just future*, Routledge, 2021.
- Widodo, Muhammad Fajar Sidiq, Rr Yunita Puspendari, Deni Yusup Permana, Anni Nur Rohmah, A. Zaenurrosyid, Hani Sholihah, dan Mukdashim Billah, *Hukum Keluarga Islam*, Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Yudhanegara, Firman, Qadriani Arifuddin, Mohammad Hidayat Muhtar, Mas Ahmad Yani, Mia Amalia, Loso Judijanto, dan Muhammad Adam HR, *Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Ilmu Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Riza, Faisal, dan Fauzi Anshari Sibarani, *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak*. Vol. 1, Umsu Press, 2021.

## 2) Karya Ilmiah/Jurnal

- Abdillah, J, Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan KHI, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2019).
- Amzad, Muhammad, dan Endrik Safudin, Hak ex officio hakim dan permasalahan nusyuz dalam perkara cerai talak, *Jurnal Antologi Hukum* 3, no. 2 (2023).
- Ananda, Wellanda Umi Fitri, Dahlia Haliah Ma'u, dan Ardiansyah Ardiansyah, Pelaksanaan Kewajiban Ayah Dan Upaya Hukum Ibu Dalam Memberi Nafkah Kepada Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, *Al-Usroh* 3, no. 1 (2023).
- Athoillah Islamy, Dimensi Maqasid Syariah dalam Putusan Hakim Atas Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jayapura. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2022).
- Habibi, Ahmad, Bintan Maulana, Hidayad Irfan, Zainul Arifin, dan Akhmad Muhaini, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Cerai Gugat Beralasan Suami Terpidana Penjara, *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (2024).
- Hasan, Zainudin, Incik Daffa Apriano, Yunika Sari Simatupang, dan Amanda Muntari, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online, *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 3 (2023).
- Huda, Muhammad Miftakhul, Suwandi Suwandi, dan Aunur Rofiq, Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022).
- Januari, Nia, Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia, *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3, no. 3 (2023).
- Kurniawan, Harry, Perlindungan Hak Anak dalam Konflik Perceraian: Analisis Hukum Keluarga Indonesia, *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 3 (2024).
- Lathif, Ah Azharuddin, dan Diana Mutia Habibaty, Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah Dan Putusan Pengadilan, *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019).

- Lie, Erick Sambuari, Implikasi Hukum Pihak Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata, *Lex Privatum* 11, no. 3 (2023).
- Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, dan Maya Oktaviani, Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, no. 1 (2021).
- Mutiara, Wilda, dan Gema Al Aqsha, Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Kelas 1 Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Terkait Pemberian Nafkah Iddah, Mut'ah Dan Madhiyah, *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 2 (2023).
- Pratama, Reviadi Rahman, *Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Bengkulu Nomor 0819/Pdt. G/2017/PA. Bn tentang Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, PhD diss., UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.
- Rahmad, Noor, dan Wildan Hafis, Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia, *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020).
- Ramadhan, Muhammad Citra, Rizkan Zulyadi, Siti Nur Khadijah, dan Jaya Prana Pinem, Faktor Penghambat Penegakan Hukum Merek Di Sumatera Utara, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 2 (2022).
- Ramdani, Riyan, dan Firda Nisa Syafithri, Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama, *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021).
- Rusydi, Bustanul Arifien, Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung, *Muslim Heritage* 5, no. 2 (2020).
- Sutrisno, Sutrisno, Fenty Puluhulawa, dan Lusiana Margareth Tijow, Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi, *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020).
- Syafi'ie, Ahmad Musta'in, Maqāṣid Hukum Keluarga Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024).
- Wardiyah, Mia Lasmi, Penegakan Hukum Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung, *Jurnal Perspektif* 2, no. 2 (2019).

Wira, I. Gusti Agung Ketut Bagus, Adi Putra, dan Ida Ayu Putu Widiati, Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung, *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020).

Yusriani, Darmawati, Ma Hafidz, dan Abdul Qahar, Efektivitas Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Studi Di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB, *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (2024).

### **3) Peraturan Perundang-undangan**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Hak-Hak Anak.
4. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya.
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
8. Putusan Mahkamah Agung Nomor 137K/AG/2007.
9. Putusan Mahkamah Agung Nomor 496/PDT.G/2024/PA.JMB.
10. Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 Tahun 2003.
11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
12. Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0259/Pdt.G/2017/PA.Bn.
13. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4462/Pdt.G/2018/PA.JS.

14. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018.
15. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
16. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020.
17. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
18. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
19. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
20. Undang-undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
22. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
23. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.